

INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

• Menjelaskan konsep WoG;

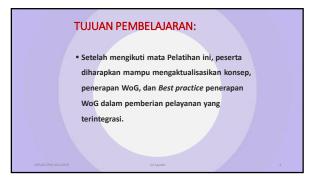
• Menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi;

• Menganalisis best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.

5

3

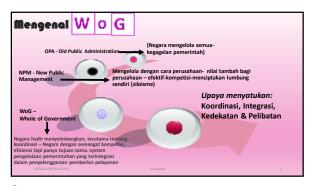






2 4







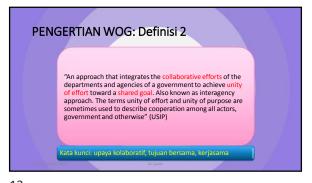
9







8 10





Kolaborasi adalah...

Proses interaksi yang kompleks dan
beragam yang melibatkan beberapa
orang untuk bekerja sama dengan
menggabungkan pemikiran secara
berkesinambungan dalam menyikapi
suatu hal dimana setiap pihak yang
terlibat saling tergantung

Kata kunci: Kerjasama

13 15 17

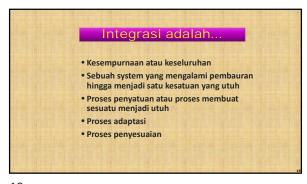
PENGERTIAN WOG: Definisi 3

Kata kunci: integrasi, koordinasi, kapasitas

• "Whole-of-government' is an overarching term for a group of responses to the problem of increased fragmentation of the public sector and public services and a wish to increase integration, coordination and capacity (Ling, 2002).



14 16 18



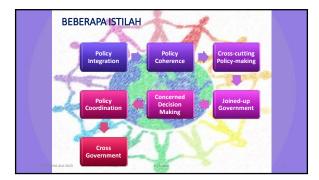


Siloisasi, prinsip singlepurpose organizations,
dengan banyak
spesialisasi serta peran
dan fungsi nonoverlapping mendorong:

Devolusi Struktural, desentralisasi, penyerahan kewenangan dari pusat ke
daerah yang berlebihan

Persepsi mengenai dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya. Isu
terorisme, radikalisme, perubahan iklim, dil.

19 21 23





Menghubungkan titik (connecting the dots)
 Menghuban pengetahuan menjadi pengalaman (turning knowledge into experience)
 Memberi makna / nilai tambah dari kesendirian menjadi keterkaitan (giving adde value from solitude to linkage / alliance).

Media mengekspresikan kepentingan & mewujudkan hasrat.

20 22

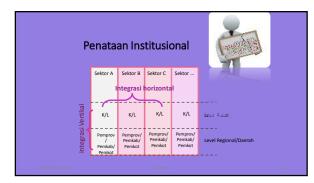






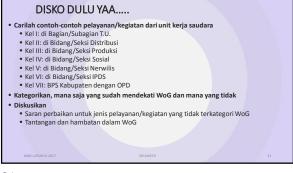
25 27 29







26 28 30





WoG dalam Pelayanan Publik di

lingkup AP

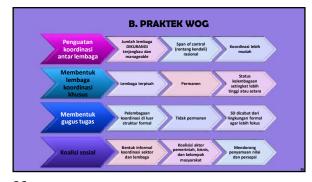
(UU No. 30/2014 tentang AP)

Administrasi pemerintahan adalah tata laksana
dalam pengambilan keputusan dan/atau
tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan
Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan
pemerintah maupun penyelenggara negara
lainnya.

31 33







32 34 36







37 39







38 40 42

KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA: DISKUSIKAN:

- 1. Apa dasar hukumnya?
- 2. Apa permasalahannya?
- 3. Siapa saja Aktor saja yang terlibat?
- 4. Bagaimana bentuk kordinasinya?
- 5. Inovasi apa yang bisa anda berikan untuk mewujudkannya.

311 30 ye



B. Best Practices: WoG di beberapa negara

No Negara Praktek WoG Keterangan

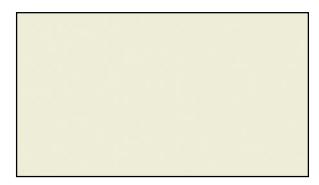
1 Inggris WoG Accounts Integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik

2 Australia APSC, Centrelink, COA6, koalisi sosial mendekatkan pelayanan publik kepada masayrakat

3 Amerika Keamanan nasional, Fokus pada isu keamanan nasional, serta Portal www.usa.gov pempafraatan 11 dalam menyatukan pemerintahan di semua tingkatan

4 Malaysia One-day service, one-day delivery dan no-wrong door dari masyarakat harus diterima dan direspon segera, walapun keluhan tersebut ditujukan ke instansi/sektor yang berbeda.

43 45 47







44 46 48



Implementasi WoG dalam Perspektif
Kebijakan di Indonesia

• Hakekat Dasar Pelayanan Publik

• WoG dalam Penyelenggaraan Negara

• WoG dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

• Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 (1) UUD 1945)

• ASN dan Pelayanan Publik

49 51 53



WoG Vertikal
Pasal 18A, 18B UUD 1945

Hubungan wewenang, yang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang; dan

Hubungan dalam hal pengakuan pembentukan Daerah.

UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik (Asas Penyelenggaraan PP) • Persamaan perlakuan/ tidak Kepentingan umum diskriminatif Kepastian hukum • Keterbukaan Kesamaan hak Akuntabilitas Keseimbangan hak dan • Fasilitas dan perlakuan kewajiban khusus bagi kelompok rentan. Keprofesionalan Ketepatan waktu Partisipatif Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

50 52 54





Pengaduan

Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan

Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

55 57 59

PerMen PAN/RB No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat Syarat penting dalam peningkatan pelayanan publik

1) Komitmen pimpinan

2) Penubahan pola pikir (minotot) terhadan fungsi pelayanan

3) Partisipasi masyarakat pengguna pelayanan

4) Kepercayaan

5) Kesadaran penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik

6) Keterbukaan

7) Ketersediaan anggaran



Mendagri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

56 58 60





61 63

